



Evaluasi Program Seragam dan Perlengkapan Sekolah Gratis di SD Negeri 43 OKU

Septa Ayu Pasela¹, Galih Mahendra², Dina Fitri³, M. Rizky Jaya Pratama⁴, Eva Susanti⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum (FISIPH) Universitas Baturaja

¹septaayupasela@gmail.com, ²galihmahendra495@gmail.com, ³dinafitria18@gmail.com, ⁴rizkipratama0825@gmail.com, ⁵evaefstos@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program seragam dan perlengkapan sekolah gratis di SD Negeri 43 OKU. Program ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan dan meringankan beban ekonomi keluarga siswa, khususnya pada jenjang kelas I sekolah dasar. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada kepala sekolah, guru, dan siswa penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini telah berjalan secara efektif. Sebanyak 90 siswa kelas I menerima bantuan berupa baju seragam merah putih, sepatu, tas, dasi, ikat pinggang, dan topi. Mekanisme distribusi dilakukan secara terbuka di lapangan sekolah dengan didampingi wali murid, sehingga menciptakan transparansi dan kepercayaan. Seluruh siswa kelas I menerima bantuan tanpa diskriminasi, menunjukkan pemerataan dalam pelaksanaan program. Respons siswa dan pihak sekolah sangat positif, terlihat dari meningkatnya semangat belajar serta kesiapan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Saran yang diberikan adalah agar program ini dapat terus dilanjutkan hingga akhir periode kebijakan guna mendukung pemerataan pendidikan dan peningkatan partisipasi sekolah.

Kata Kunci: Evaluasi Program, Seragam Sekolah Gratis, Perlengkapan Sekolah, SD Negeri 43 OKU, Akses Pendidikan.

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok ekonomi kurang mampu (Hasbullah, 2013). Namun, dalam praktiknya, masih terdapat hambatan nyata dalam akses pendidikan, salah satunya adalah biaya perlengkapan sekolah seperti seragam dan peralatan belajar yang seringkali menjadi beban tersendiri bagi keluarga tidak mampu (Suprastowo, 2013).

Berbagai kebijakan telah diimplementasikan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di tingkat nasional, pemerintah mengeluarkan program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang bertujuan mengurangi angka putus sekolah serta meringankan biaya pendidikan (Kemendikbud, 2021). Sementara di tingkat daerah, inovasi kebijakan pendidikan juga terus berkembang, salah satunya melalui program bantuan seragam dan perlengkapan sekolah gratis. Di Provinsi Sumatera Selatan, Program Sekolah Gratis (PSG) yang diluncurkan sejak tahun 2009 terbukti mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menurunkan angka putus sekolah secara signifikan (Marzuki, 2020).

Penelitian Setiyaningrum dkk. (2023) menunjukkan bahwa bantuan perlengkapan sekolah melalui PIP efektif dalam mendukung pemenuhan kebutuhan belajar siswa. Lebih lanjut, Wijianto dkk. (2025) dalam kajian di Kabupaten Malang menemukan bahwa kebijakan pendidikan gratis secara nyata meningkatkan kualitas pendidikan dan menurunkan angka kemiskinan pendidikan. Temuan-temuan ini memperkuat argumen bahwa program bantuan perlengkapan sekolah merupakan instrumen kebijakan yang efektif dalam mendukung pemerataan pendidikan.

Kendati demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan pada dampak program secara umum di tingkat makro atau kabupaten/kota. Kajian yang secara spesifik mengevaluasi mekanisme pelaksanaan, ketepatan sasaran, serta respons penerima manfaat di tingkat satuan pendidikan masih sangat terbatas (Laksita & Mawardi, 2022). Padahal, evaluasi pada level implementasi sangat penting untuk memastikan bahwa program berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Arikunto dan Cepi (2010), evaluasi program yang baik harus mencakup aspek input, proses, output, dan outcome.

Program bantuan seragam dan perlengkapan sekolah gratis juga merupakan bagian dari kebijakan prioritas bupati Ogan Komering Ulu dalam meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan di daerah. Kebijakan ini mencerminkan komitmen kepala daerah dalam mengurangi beban biaya pendidikan yang ditanggung masyarakat, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Dalam konteks otonomi daerah, inovasi kebijakan semacam ini menjadi bentuk respons pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat secara langsung (Mulyasa, 2014).

SD Negeri 43 OKU sebagai salah satu pelaksana program bantuan seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa kelas I menjadi objek yang relevan untuk dikaji. Sekolah ini berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, dan melayani peserta didik dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi. Hingga saat ini, belum terdapat kajian yang secara khusus mengevaluasi pelaksanaan program tersebut di sekolah ini, terutama dari aspek distribusi, pemerataan, dan efektivitasnya.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan mekanisme distribusi program seragam dan perlengkapan sekolah gratis di SD Negeri 43 OKU; (2) menganalisis cakupan penerima manfaat dan ketepatan sasaran program; (3) mengevaluasi efektivitas program dari sisi ekonomi dan psikologis; serta (4) menggali respons penerima manfaat terhadap program. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata sebagai bahan evaluasi dan masukan kebijakan pendidikan di tingkat daerah.

2. Tinjauan Pustaka

a. Evaluasi Program Pendidikan

Evaluasi program merupakan kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi tentang pelaksanaan dan dampak suatu program (Arikunto & Cepi, 2010). Dalam konteks pendidikan, evaluasi program bertujuan untuk menilai apakah sebuah program pendidikan telah berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang diharapkan bagi peserta didik. Menurut Stufflebeam (dalam Tayibnapis, 2008), terdapat empat dimensi evaluasi yang dikenal dengan model CIPP, yaitu Context (konteks), Input (masukan), Process (proses), dan Product (hasil).

Model evaluasi CIPP telah banyak digunakan dalam penelitian evaluasi program pendidikan di Indonesia. Evaluasi konteks berkaitan dengan lingkungan program dan kebutuhan yang ingin dipenuhi. Evaluasi input mencakup sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaan program. Evaluasi proses berfokus pada bagaimana program dijalankan. Sementara evaluasi produk berkaitan dengan hasil yang dicapai (Laksita & Mawardi, 2022). Pendekatan ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang keberhasilan dan kelemahan suatu program.

b. Program Bantuan Perlengkapan Sekolah

Bantuan perlengkapan sekolah merupakan salah satu instrumen kebijakan pendidikan yang bertujuan mengurangi hambatan ekonomi dalam akses pendidikan. Penelitian Suprastowo (2013) menunjukkan bahwa biaya perlengkapan sekolah, termasuk seragam, berkontribusi signifikan terhadap angka putus sekolah di keluarga ekonomi rendah. Dengan demikian, program bantuan perlengkapan sekolah tidak hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlangsungan pendidikan anak. Di berbagai negara berkembang, program uniform subsidy atau bantuan seragam sekolah telah terbukti efektif meningkatkan angka kehadiran dan partisipasi siswa (UNESCO, 2017). Di Indonesia, kebijakan serupa telah diimplementasikan di berbagai daerah dengan variasi desain program yang berbeda-beda. Namun, efektivitas program sangat bergantung pada mekanisme distribusi, transparansi pelaksanaan, dan kesesuaian dengan kebutuhan riil penerima manfaat (Setyaningrum dkk., 2023).

c. Kebijakan Pendidikan Daerah

Dalam era otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola sektor pendidikan, termasuk merumuskan program bantuan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal (Mulyasa, 2014). Program Sekolah Gratis di Sumatera Selatan yang diluncurkan sejak 2009 menjadi salah satu contoh kebijakan pendidikan daerah yang berhasil. Marzuki (2020) mencatat bahwa PSG berhasil meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan menurunkan angka putus sekolah di provinsi tersebut.

Keberhasilan program pendidikan daerah tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah, sekolah, dan orang tua siswa. Penelitian Wijianto dkk. (2025) menegaskan bahwa komunikasi yang intensif antara sekolah dan keluarga menjadi faktor kunci keberhasilan program pendidikan gratis. Selain itu, transparansi dalam pelaksanaan dan akuntabilitas pengelolaan program juga menjadi

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena secara mendalam berdasarkan perspektif para pelaku yang terlibat langsung dalam program (Moleong, 2017). Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh

data yang kaya dan mendalam tentang proses pelaksanaan program, termasuk aspek-aspek yang tidak terukur secara kuantitatif seperti respons emosional dan persepsi penerima manfaat. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai proses pelaksanaan program serta dampaknya terhadap penerima manfaat di lingkungan sekolah.

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 43 OKU, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu sekolah dasar yang aktif melaksanakan program bantuan seragam dan perlengkapan sekolah gratis untuk siswa kelas I tahun ajaran 2024/2025. Pemilihan lokasi juga didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas dan ketersediaan data di lapangan.

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan tiga narasumber utama, yaitu kepala sekolah SD Negeri 43 OKU sebagai pihak pengelola program, seorang guru sebagai pelaksana teknis di lapangan, dan seorang siswa kelas I penerima manfaat bernama Adinda Rindu sebagai representasi penerima bantuan. Pemilihan narasumber dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program, sehingga data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Selain wawancara, penelitian juga dilengkapi dengan observasi langsung pada proses distribusi bantuan dan dokumentasi foto.

Teknik wawancara dilakukan secara langsung di lokasi sekolah dalam suasana yang kondusif. Setiap wawancara dilakukan satu kali pada masing-masing narasumber dengan durasi sekitar 20–30 menit. Pertanyaan wawancara disusun secara fleksibel namun tetap terarah, mencakup mekanisme distribusi bantuan, ketepatan sasaran penerima, efektivitas pelaksanaan program, respons siswa terhadap bantuan yang diterima, serta saran perbaikan program ke depan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif melalui beberapa tahapan mengacu pada model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2019), yaitu: (1) reduksi data, yaitu memilih dan merangkum informasi yang relevan dengan fokus penelitian; (2) penyajian data dalam bentuk uraian naratif yang sistematis; dan (3) penarikan kesimpulan berdasarkan pola jawaban yang muncul dari narasumber. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengkonfirmasi informasi yang diperoleh dari ketiga narasumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan kebenaran data.

Proses distribusi bantuan dilakukan secara langsung di lapangan sekolah dengan melibatkan wali murid. Kegiatan tersebut didokumentasikan melalui foto sebagai data pendukung penelitian ini.

Gambar 1. Proses Distribusi Seragam dan Perlengkapan Sekolah Gratis di SD Negeri 43 OKU



4. Hasil dan Pembahasan

a. Mekanisme Distribusi Bantuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, mekanisme distribusi seragam dan perlengkapan sekolah gratis di SD Negeri 43 OKU dilakukan secara terbuka dan melibatkan wali murid. Seluruh siswa kelas I dibariskan di lapangan sekolah dan menerima bantuan secara langsung dengan didampingi orang tua atau wali mereka. Proses distribusi ini dilaksanakan sekitar bulan Oktober atau kurang lebih tiga bulan setelah awal semester pembelajaran dimulai. Pelaksanaan yang dilakukan secara terbuka ini menunjukkan adanya upaya transparansi dalam penyaluran

bantuan kepada peserta didik, sehingga meminimalkan potensi kesalahan distribusi maupun penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Sistem distribusi terbuka yang diterapkan di SD Negeri 43 OKU sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan publik (Dwiyanto, 2011). Pelibatan wali murid secara langsung tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan program oleh pihak sekolah. Transparansi ini penting untuk menghindari potensi penyimpangan yang kerap menjadi tantangan dalam implementasi program bantuan sosial di lapangan. Pola distribusi semacam ini sejalan dengan praktik yang dilaporkan di berbagai daerah lain. Pemerintah Kota Tanjungpinang, misalnya, melakukan penyerahan bantuan secara simbolis di hadapan wali murid untuk memastikan bantuan benar-benar diterima dan dapat digunakan oleh siswa (RiauKepri, 2025). Begitu pula di Kalimantan Tengah, distribusi seragam gratis dilakukan secara terbuka dan melibatkan komunitas sekolah (Habar Kalteng, 2026). Pelibatan wali murid dalam proses distribusi tidak hanya membangun transparansi, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program serta memperkuat rasa tanggung jawab bersama antara pihak sekolah dan keluarga siswa dalam mendukung keberhasilan program pendidikan.

Dari keterangan guru, pembagian dilakukan secara merata di lapangan tanpa membedakan siswa. Seluruh peserta didik kelas I mendapatkan hak yang sama tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah telah menjalankan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam implementasi kebijakan pendidikan. Dengan tidak adanya proses seleksi penerima, program ini mampu menghindari potensi kecemburuan sosial antar siswa serta menciptakan suasana yang lebih inklusif di lingkungan sekolah.

Namun demikian, pelaksanaan distribusi yang dilakukan beberapa bulan setelah awal semester menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam aspek ketepatan waktu. Idealnya, bantuan perlengkapan sekolah diberikan pada awal tahun ajaran agar siswa dapat langsung memanfaatkannya sejak hari pertama masuk sekolah. Keterlambatan distribusi ini kemungkinan disebabkan oleh proses pengadaan barang yang memerlukan waktu cukup panjang. Meskipun demikian, secara keseluruhan mekanisme distribusi yang diterapkan telah mencerminkan prinsip transparansi, pemerataan, dan akuntabilitas yang baik dalam pelaksanaan program.

b. Cakupan Penerima Manfaat

Jumlah total siswa kelas I yang menerima bantuan di SD Negeri 43 OKU adalah 90 siswa, terdiri dari 47 siswa perempuan dan 43 siswa laki-laki. Seluruh siswa kelas I menerima bantuan tanpa pengecualian. Cakupan yang menyeluruh ini menunjukkan bahwa program telah berjalan sesuai dengan prinsip universalitas, di mana seluruh siswa pada jenjang tertentu berhak memperoleh bantuan tanpa seleksi administratif maupun ekonomi.

Tabel 1. Data Penerima Bantuan Siswa Kelas I SD Negeri 43 OKU

Kategori	Jumlah Siswa	Persentase
Perempuan	47 siswa	52,2%
Laki-laki	43 siswa	47,8%
Total	90 siswa	100%

Kondisi ini berbeda dengan program bantuan pendidikan berbasis seleksi seperti BSM atau KIP yang hanya menysasar kelompok tertentu berdasarkan kriteria kemiskinan. Dengan memberikan bantuan kepada seluruh siswa kelas I, program ini menekankan pendekatan inklusif yang tidak hanya berorientasi pada kelompok rentan, tetapi juga menjamin kesetaraan akses sejak awal pendidikan dasar (Marzuki, 2020). Pendekatan universal semacam ini dinilai mampu meminimalkan potensi stigmatisasi sosial terhadap siswa penerima bantuan serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih setara dan harmonis. Dibandingkan dengan program serupa di daerah lain, cakupan 100% untuk seluruh siswa kelas I merupakan pencapaian yang baik. Di Bontang, Kalimantan Timur, pemerintah daerah menyiapkan lebih dari 29 ribu seragam gratis untuk mendukung akses pendidikan (Media Kaltim, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberian seragam gratis secara universal telah menjadi tren kebijakan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia.

c. Jenis Perlengkapan yang Diterima Siswa

Berdasarkan keterangan siswa penerima manfaat, Adinda Rindu, bantuan yang diterima meliputi baju seragam merah putih, sepatu, tas, dasi, ikat pinggang, dan topi. Paket bantuan ini tergolong lengkap karena mencakup kebutuhan dasar yang wajib dimiliki siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kelengkapan tersebut menunjukkan bahwa program dirancang secara komprehensif untuk memastikan siswa dapat berpartisipasi secara optimal dalam kegiatan pendidikan tanpa mengalami hambatan dari segi perlengkapan. Kelengkapan perlengkapan tersebut menunjukkan bahwa program tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan riil siswa di lapangan. Setiap item yang diberikan memiliki fungsi yang mendukung aktivitas sekolah, mulai dari seragam sebagai identitas dan kedisiplinan, hingga tas dan sepatu yang menunjang kenyamanan serta kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran sehari-hari.

Di berbagai daerah lain, paket bantuan seragam juga mencakup item yang serupa, bahkan dalam beberapa kasus ditambah dengan seragam tambahan seperti pakaian olahraga atau pramuka (Habar Kalteng, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat standar umum dalam penyusunan paket bantuan perlengkapan sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional siswa. Dengan adanya kesamaan komponen bantuan di berbagai daerah, dapat disimpulkan bahwa program ini telah mengikuti praktik yang lazim dan diakui dalam kebijakan pendidikan nasional. Lebih lanjut, kelengkapan bantuan ini juga berpotensi memberikan dampak psikologis positif bagi siswa, seperti meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan dalam berinteraksi di lingkungan sekolah. Siswa yang memiliki perlengkapan yang sama dengan teman-temannya cenderung merasa lebih setara dan tidak mengalami perasaan minder atau rendah diri (Hidayat & Suryana, 2018). Dengan demikian, keberadaan paket perlengkapan yang lengkap tidak hanya mendukung aspek administratif dan teknis pembelajaran, tetapi juga berkontribusi terhadap aspek sosial dan psikologis siswa dalam proses pendidikan.

d. Efektivitas Program

Kepala sekolah menyatakan bahwa program ini berjalan dengan efektif dalam membantu siswa. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari dua sisi utama, yaitu sisi ekonomi dan sisi psikologis. Penilaian ini didasarkan pada kondisi nyata siswa setelah menerima bantuan serta perubahan yang terlihat dalam kegiatan belajar di sekolah. Dari sisi ekonomi, program ini membantu mengurangi beban pengeluaran orang tua, terutama di awal tahun ajaran baru yang biasanya membutuhkan biaya cukup besar untuk membeli perlengkapan sekolah. Dengan adanya bantuan ini, orang tua tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk seragam dan perlengkapan lainnya, sehingga pengeluaran keluarga dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang juga mendesak. Hal ini sangat membantu, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas yang seringkali harus memilih antara biaya sekolah dengan kebutuhan pokok lainnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Setyaningrum dkk. (2023) yang menyatakan bahwa bantuan perlengkapan sekolah dapat membantu menunjang keberlangsungan pendidikan siswa, khususnya dalam mencegah putus sekolah akibat ketidakmampuan ekonomi.

Dari sisi psikologis, siswa yang menerima bantuan terlihat lebih semangat dalam belajar dan lebih percaya diri. Mereka merasa lebih siap mengikuti kegiatan belajar karena sudah memiliki perlengkapan yang lengkap seperti teman-temannya. Hal ini juga membuat siswa merasa lebih setara dan tidak minder di lingkungan sekolah. Dampak psikologis positif semacam ini berhubungan erat dengan teori self-efficacy yang dikemukakan oleh Bandura (1997), yang menyatakan bahwa keyakinan diri seseorang dalam menyelesaikan tugas dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang mendukung, termasuk ketersediaan perlengkapan belajar yang memadai. Secara keseluruhan, program ini dapat dikatakan efektif karena mampu memberikan manfaat nyata bagi siswa dan keluarganya, baik dari aspek ekonomi maupun psikologis. Temuan ini konsisten dengan kajian Wijianto dkk. (2025) yang menemukan bahwa kebijakan pendidikan gratis memberikan dampak positif yang multidimensi, tidak hanya pada aspek material tetapi juga pada aspek motivasi dan partisipasi belajar siswa.

e. Respons Penerima Manfaat

Respons dari berbagai pihak terhadap program ini menunjukkan hasil yang sangat positif. Guru menyampaikan bahwa siswa merasa senang dan antusias saat menerima bantuan. Siswa penerima manfaat juga mengungkapkan bahwa bantuan tersebut sangat membantu dan membuat mereka lebih semangat untuk bersekolah. Hal ini menunjukkan bahwa program tidak hanya diterima dengan baik, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap motivasi belajar siswa. Selain itu, keterlibatan wali murid dalam proses distribusi menunjukkan adanya dukungan yang kuat dari pihak keluarga terhadap program ini. Kehadiran orang tua tidak hanya sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga mempererat hubungan antara sekolah dan keluarga. Komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua siswa merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan program pendidikan secara keseluruhan, karena keterlibatan orang tua berkaitan erat dengan motivasi dan prestasi belajar anak di sekolah (Marzuki, 2020; Epstein, 2011). Hal ini sejalan dengan pendapat Marzuki (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh kerja sama sinergis antara pemerintah, sekolah, dan orang tua. Kepala sekolah juga mengapresiasi adanya program ini dan berharap dapat dilanjutkan pada periode berikutnya. Apresiasi ini mencerminkan bahwa program telah memenuhi ekspektasi pengelola di tingkat sekolah. Dari sudut pandang manajemen sekolah, program ini telah membantu mengurangi beban administrasi dan sosial yang

biasanya muncul ketika terdapat perbedaan kondisi perlengkapan antar siswa, sehingga fokus pembelajaran dapat lebih terjaga.

f. Saran dan Harapan

Kepala sekolah SD Negeri 43 OKU menyarankan agar program seragam dan perlengkapan sekolah gratis ini dapat terus dilanjutkan hingga periode kebijakan berakhir. Saran ini menunjukkan bahwa program tersebut dirasakan bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah. Keberlanjutan program merupakan aspek krusial dalam kebijakan pendidikan karena dampak jangka panjang sebuah program baru dapat terlihat setelah berjalan secara konsisten dalam beberapa tahun (Tayibnapis, 2008). Selain keberlanjutan, terdapat harapan agar distribusi bantuan dapat dilakukan lebih awal, yaitu pada awal tahun ajaran. Dengan demikian, siswa dapat langsung menggunakan perlengkapan tersebut sejak hari pertama masuk sekolah. Ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan menjadi hal penting karena berpengaruh terhadap manfaat optimal yang dapat diterima siswa. Untuk memperbaiki aspek ini, diperlukan perencanaan pengadaan barang yang lebih matang sejak jauh-jauh hari sebelum tahun ajaran baru dimulai. Selain itu, beberapa saran tambahan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas program di masa mendatang antara lain: (1) penambahan jenis perlengkapan seperti seragam olahraga dan alat tulis; (2) pengembangan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang lebih sistematis; (3) pelibatan orang tua siswa dalam perencanaan program; serta (4) dokumentasi yang lebih komprehensif sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kepada pemangku kebijakan.

5. Kesimpulan

Program seragam dan perlengkapan sekolah gratis di SD Negeri 43 OKU telah berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Seluruh 90 siswa kelas I menerima bantuan berupa seragam merah putih, sepatu, tas, dasi, ikat pinggang, dan topi tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau latar belakang ekonomi. Mekanisme distribusi dilakukan secara transparan di lapangan sekolah dengan keterlibatan aktif wali murid, sehingga menciptakan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap program. Program ini memberikan dampak positif yang multidimensi. Secara ekonomi, program ini meringankan beban pengeluaran keluarga siswa di awal tahun ajaran, memberikan ruang lebih luas bagi keluarga untuk memenuhi kebutuhan lain. Secara psikologis, program ini meningkatkan semangat, motivasi belajar, dan rasa percaya diri siswa karena mereka merasa setara dengan teman-temannya dalam hal perlengkapan sekolah. Respons dari kepala sekolah, guru, dan siswa penerima manfaat semuanya positif, menandakan tingkat penerimaan yang tinggi terhadap program ini. Adapun saran utama yang perlu diperhatikan untuk perbaikan program ke depan adalah: (1) menjaga keberlanjutan program hingga akhir periode kebijakan; (2) memperbaiki jadwal distribusi agar dilaksanakan pada awal tahun ajaran sehingga siswa dapat langsung menggunakannya; (3) menambah jenis perlengkapan yang diberikan seperti seragam olahraga dan alat tulis; serta (4) memperkuat mekanisme evaluasi berkala untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik. Program ini layak dijadikan model kebijakan pendidikan yang dapat direplikasi di sekolah-sekolah lain dengan kondisi serupa.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S., & Cepi, S. A. J. (2010). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bandura, A. (1997). *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. New York: W.H. Freeman and Company.
- Dwiyanto, A. (2011). *Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Epstein, J. L. (2011). *School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools* (2nd ed.). Boulder, CO: Westview Press.
- Habar Kalimantan Tengah. (2026, Maret 5). *Gebrakan Baru Pendidikan Kalteng, Dari Seragam Gratis hingga Program Dokter Spesialis*. Diakses dari <https://www.habarkalimantantengah.com/2026/03/gebrakan-baru-pendidikan-kalteng-dari.html>
- Hasbullah. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hidayat, R., & Suryana, Y. (2018). *Pendidikan Karakter: Perspektif Ilmu Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kemendikbud. (2021). *Panduan Program Indonesia Pintar Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Laksita, A., & Mawardi, M. (2022). *Evaluasi Program Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar*. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 8869–8878. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i5.3906>
- Marzuki, E. (2020). *Kebijakan Program Sekolah Gratis (PSG) dan Dampaknya terhadap Akses Layanan Memperoleh Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan*. *Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan*, 5(3). <https://doi.org/10.46774/pptk.v5i3.220>
- Media Kaltim. (2026, April). *Dukung Akses Pendidikan, Bontang Siapkan 29 Ribu Lebih Seragam Gratis*. Diakses dari <https://mediakaltim.com/dukung-akses-pendidikan-bontang-siapkan-29-ribu-lebih-seragam-gratis/>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.8261>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- Mulyasa, E. (2014). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- RiauKepri.com. (2025, Desember 15). *Masuk Sekolah Tanpa Beban Biaya, Pemko Tanjungpinang Perkuat Akses Pendidikan Dasar Lewat Bantuan Seragam*. Diakses dari <https://www.riaukepri.com/2025/12/15/masuk-sekolah-tanpa-beban-biaya-pemko-tanjungpinang-perkuat-akses-pendidikan-dasar-lewat-bantuan-seragam/>
- Setyaningrum, A., Harsan, T., & Fatimah, S. (2023). Efektivitas Akses Layanan Pendidikan Melalui Program Indonesia Pintar Peserta Didik. *Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(2), 1263–1272. <https://doi.org/10.47200/edukasia.v4i2.400>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprastowo, P. (2013). *Bantuan Pembiayaan Personal untuk Siswa Miskin, Turunkan Angka Putus Sekolah*. *Majalah Jendela Kemendikbud*. Diakses dari <https://jendela.kemdikbud.go.id>
- Tayibnapi, F. Y. (2008). *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- UNESCO. (2017). *Education for Sustainable Development: A Roadmap*. Paris: UNESCO Publishing.
- Wijianto, Pramono, S., Pramudiana, I. D., & Sholichah, N. (2025). Dampak Kebijakan Pendidikan Gratis bagi Masyarakat dengan Kategori Keluarga Miskin dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Malang. *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary*. <https://doi.org/10.30588/multiple.v3i2.1083>

Dokumentasi Penelitian

